

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* DAN
KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
WILAYAH SUMATERA UTARA
TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

OLEH :

**RAHMADIYAH SYAFITRI
208330005**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* DAN
KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
WILAYAH SUMATERA UTARA
TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Oleh :

RAHMADIYAH SYAFITRI

208330005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.
Nama : RAHMADIYAH SYAFITRI
NPM : 208330005
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding


(Sukitra Dewi, SE, M.Si)
Pembimbing


(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Si)
Pembanding

Mengetahui:


(Ahmad Rafki, BBA (Hons), MMgt.Ph.D, CIMA)
Dekan Fakultas Ekonomi


(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 05 Maret 2025

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Maret 2025



RAHMADIYAH SYAFITRI
NPM : 208330005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmadiyah Syafitri
NPM : 208330005
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnispe
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-executive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara Tahun 2021-2023**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 05 Maret 2025
Yang menyatakan

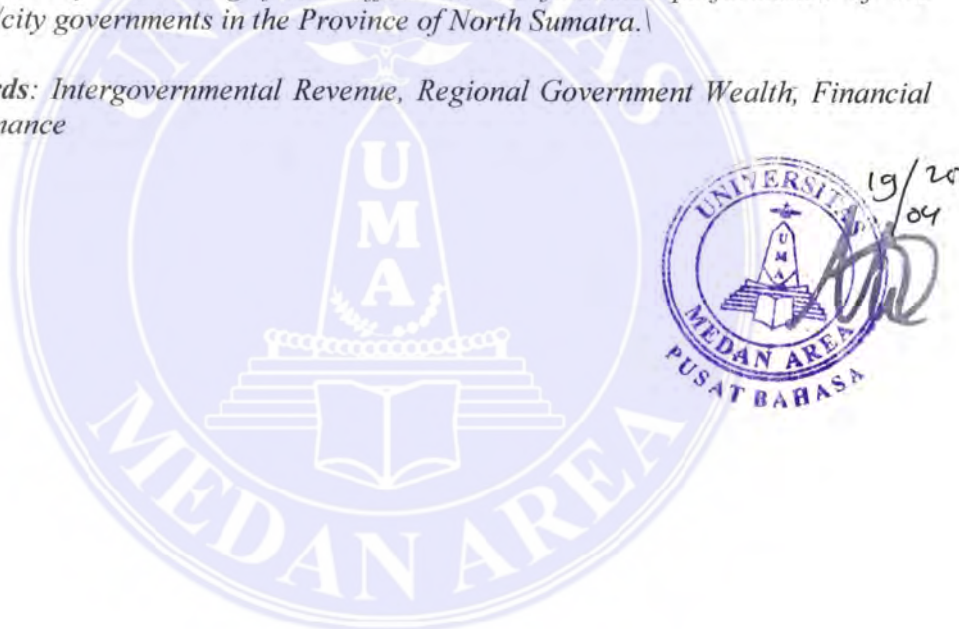


RAHMADIYAH SYAFITRI
NPM : 208330005

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of intergovernmental revenue and regional government wealth on the financial performance of regional governments in the North Sumatra region from 2021 to 2023. This research used secondary data, which were obtained from the financial reports of regional governments in the North Sumatra region through www.ppil.kemenkeu.go.id or through the available PPID application. The population in this research was the financial reports of 33 districts/cities in North Sumatra for the period 2021–2023. A saturated sampling technique was used to take the samples in this research. The research sample was 33 districts/cities in North Sumatra that met the criteria. The data analysis technique in this research used panel data regression. The results of this research showed that intergovernmental revenue had a positive and significant effect on financial performance, regional government wealth had a negative and significant effect on financial performance, while the simultaneous test showed that intergovernmental revenue and regional government wealth simultaneously had a significant effect on the financial performance of the district/city governments in the Province of North Sumatra.

Keywords: *Intergovernmental Revenue, Regional Government Wealth, Financial Performance*

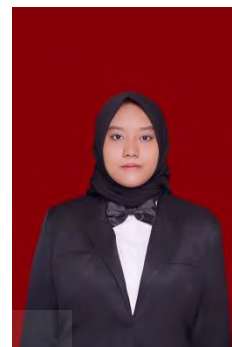


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder ini diperoleh dari data laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara melalui www.ppid.kemenkeu.go.id atau melalui aplikasi PPID yang tersedia. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten/kota periode tahun 2021-2023. Teknik sampel jenuh digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 33 kabupaten/kota Sumatera Utara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan.

RIWAYAT HIDUP



Nama	Rahmadiyah Syafitri
Npm	208330005
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 24 Desember 2001
Nama Orang Tua	
Ayah	Lilik Iman Sujoko, S.T
Ibu	Sri Sunarti
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP Negeri 1 MEDAN
SMA/SMK	SMA Negeri 15 MEDAN
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	Administrasi PT.Sri Intan Karplas Industry
No. HP/WA	0896 9044 6087
Email	ramsyftr2412@gmail.com

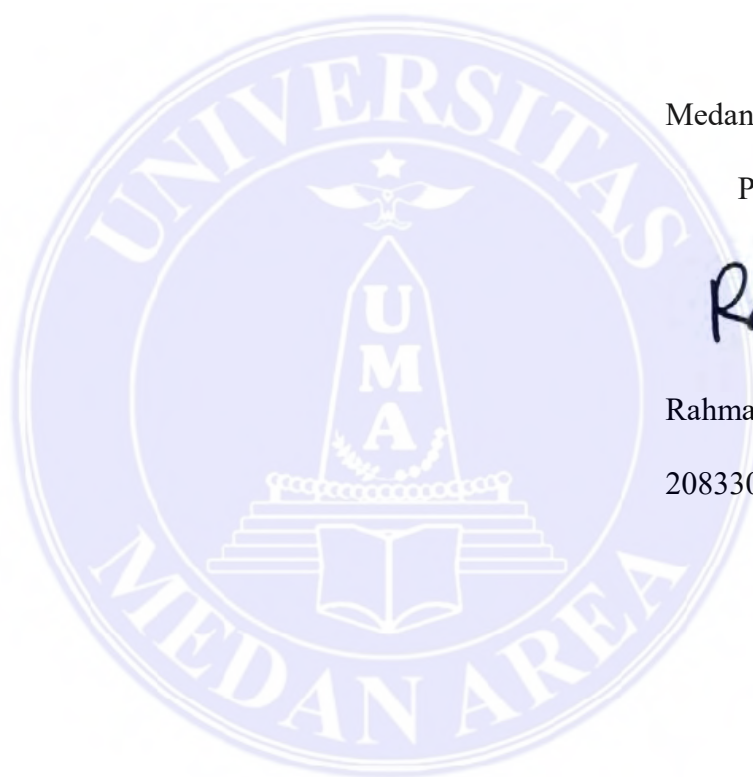
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **“Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara Tahun 2021-2023”** yang persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti dengan segala syukur dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph, D, CIMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi di Universitas Medan Area.
4. Ibu Sucitra Dewi, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.

6. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Sekretaris yang juga telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Teruntuk kedua orang tua peneliti yang sangat dicinta yaitu Ibunda Sri Sunarti dan Ayahanda Lilik Iman Sujoko, terima kasih atas dukungan moril serta yang tiada hentinya untuk peneliti sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teruntuk kedua adik peneliti, terima kasih telah menjadi semangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan peneliti, terima kasih atas waktu yang telah dihabiskan bersama dalam masa perkuliahan dan pada saat proses pengerjaan skripsi hingga saat ini.
10. Ucapan terima kasih untuk diri sendiri yang tetap tegar dan telah bertahan hingga saat ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Peneliti berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih.



Medan, 01 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rah", is written over the seal.

Rahmadiyah Syafitri

208330005

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Sinyal.....	12
2.2 Tinjauan Pustaka	13
2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.2.1.1 Definisi Kinerja Keuangan.....	13
2.2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	14
2.2.1.3 Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan	14
2.2.2 <i>Intergovernmental Revenue</i>	17
2.2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
2.4 Kerangka Konseptual	24
2.5 Hipotesis	24
2.5.1 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.5.2 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.5.3 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	 28
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Objek dan Waktu Penelitian	28
3.3 Definisi Operasional.....	29
3.3.1 Variabel Dependen	29
3.3.2 Variabel Independen.....	29
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32

3.6 Metode Analisis Data	33
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	33
3.6.2 Pemilihan Model Regresi.....	33
3.6.2.1 Uji <i>Chow</i>	33
3.6.2.2 Uji <i>Hausman</i>	34
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	34
3.6.3.1 Uji Normalitas	34
3.6.3.2 Uji Multikolinieritas.....	35
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	35
3.6.3.4 Uji Autokorelasi.....	36
3.6.4 Analisis Regresi Data Panel.....	37
3.6.5 Pengujian Hipotesis	38
3.6.5.1 Uji Signifikansi (Uji Parsial)	38
3.6.5.2 Uji F (Uji Simultan)	39
3.6.5.3 Uji Determinasi (R^2)	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pengujian Data	41
4.1.1 Statistik Deskriptif.....	41
4.1.2 Pemilihan Model.....	42
4.1.2.1 Uji <i>Chow</i>	42
4.1.2.2 Uji <i>Hausman</i>	44
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.1.3.1 Uji Normalitas	44
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas	45
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.1.3.4 Uji Autokorelasi.....	46
4.1.4 Regresi Data Panel.....	47
4.1.5 Pengujian Hipotesis	49
4.1.5.1 Uji Signifikansi (Uji Parsial)	49
4.1.5.2 Uji F (Uji Simultan)	50
4.1.5.3 Uji Determinasi (R^2)	51
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	52
4.2.2 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	53
4.2.3 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	54
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2021-2023.....	4
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023	6
Tabel 3.1 Perencanaan Jadwal Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
Tabel 3.3 Daftar kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara	31
Tabel 3.4 Seleksi dan Pemilihan Sampel.....	32
Tabel 4.1 Analisa Dekskriptif Variabel	41
Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel menggunakan <i>Common Effect</i> (PLS).....	42
Tabel 4.3 Hasil Regresi Data Panel menggunakan <i>Model Fixed Effect</i>	43
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Chow</i>	43
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Hausman</i>	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi.....	47
Tabel 4.10 Hasil Uji t (Uji Parsial)	50
Tabel 4.11 Hasil Uji F (Uji Simultan)	50
Tabel 4.12 Hasil Uji R-square	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	24
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023	59
Lampiran 2 Output Hasil Uji Eviews.....	61
Lampiran 3 Output Hasil Penelitian	65
Lampiran 4 Surat Izin Riset.....	67
Lampiran 5 Surat Balasan DJPK	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara mengatur perekonomian dengan menggunakan anggaran sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau sehingga dalam melaksanakan perekonomian memerlukan sebuah anggaran. Anggaran merupakan rancangan kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dengan satuan moneter (Sujarweni 2022). Mewujudkan perekonomian yang merata setiap daerah, Indonesia memakai asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan kebijakan guna pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah sehingga daerah dapat langsung melaksanakan program dan pelayanan. Hak yang dimiliki pemerintah daerah atas pengolahan sumber daya daerahnya dan mengelola dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut Asas Desentralisasi (BPK RI 2014).

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: Nilai Unitaris dan Nilai dasar Desentralisasi Teritorial. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah diberi kesempatan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya

agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Pemerintahan merupakan organisasi sektor publik sehingga anggaran yang dibentuk merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi guna memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemilik dan pelaksanaan tersebut dibiayai dengan uang publik. Oleh karena itu, organisasi sektor publik juga memerlukan perbaikan kinerja yang terukur ketika dana yang dialokasikan kepada daerah akan diproses dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD dinilai sebagai laporan yang kredibel karena memuat informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam pemerintahan. Untuk melihat kemampuan daerah menjalankan otonomi daerah dapat menggunakan kinerja keuangan sebagai salah satu pengukuran (Patarai 2017).

Kinerja keuangan merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik maupun non fisik menyangkut keuangan baik meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan kinerja. Kinerja keuangan merupakan tindakan analisa yang dilakukan guna melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi 2018). Dengan adanya publikasi tentang hasil laporan keuangan maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah menjalankan tugasnya, karena masih banyak masyarakat yang merasakan perkembangan daerahnya tidak berjalan dengan baik (Satria and Sari

2018).

Pada hakikatnya, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya sebagai bentuk pengendalian, namun juga sebagai evaluasi terhadap tingkat efisiensi dalam kegiatan pemerintahan serta memantau perbedaan antara biaya yang diperkirakan dengan biaya yang sebenarnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjabarkan definisi dari pajak daerah yang merupakan suatu bentuk kontribusi wajib yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang guna keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak daerah menjadi salah satu sumber penting yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah tinggi atau sesuai dengan target yang ditetapkan maka akan menunjukkan kinerja keuangan yang bagus pada daerah tersebut.

Menilai kinerja keuangan suatu daerah dapat dilihat dari dana perimbangan atau *intergovernmental revenue* dan melalui kekayaan yang dimiliki daerah. *Intergovernmental revenue* atau yang biasa disebut sebagai dana perimbangan (Suhardjanto, et al. 2010). Pendapatan yang diterima pemerintah daerah berasal dari sumber eksternal atau disebut sebagai *intergovernmental revenue* tidak diperlukan pembayaran kembali (Patrick 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan asas desentralisasi demi keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari sektor pajak daerah per 20 November 2023 baru mencapai 77,54%. Artinya, baru sekitar Rp5,76 triliun yang terceruk dari target pendapatan pajak daerah Sumatera Utara yang ditetapkan sebesar Rp7,43 triliun. Dibawah ini terdapat tabel PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2021-2023:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2021-2023 (dalam miliar rupiah).

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Kenaikan/Penurunan PAD (%)
2020	5.077,07	-
2021	5.659,15	10,29%
2022	5.906,23	4,18%
2023	6.513,26	9,32%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), (Data Diolah, 2024)

Pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 10,29% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 PAD kembali mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, namun tingkat kenaikannya hanya 4,18%. Pada tahun 2023 PAD juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 9,32%, namun kenaikan tersebut masih lebih rendah dari kenaikan tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan

penerimaan pendapatan dari setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, adanya kenaikan juga penurunan terhadap pendapatan penerimaan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dikarenakan hal tersebut pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai cara untuk menambah pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan penetapan regulasi, dan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan PAD.

Tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah dinilai dari Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai dana perimbangan. Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif *intergovernmental revenue* secara parsial dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Iswantini, Hirmantono and Natalia 2021). Hal tersebut sejalan dengan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Putri and Darmayanti 2019). *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian (Nugroho and Praestyo 2018). Namun berbeda dengan hasil pada penelitian selanjutnya bahwa tidak adanya pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Achmad, Septiyanti and Metalia 2017).

Perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dihitung dari tingkat efisiensi suatu daerah dalam mengelola dana pendapatan asli daerah untuk belanja pegawai dan belanja barang daerah tersebut. Selain hal tersebut, tingkat dari *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Daerah kerap dijadikan acuan dalam

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Dibawah ini disajikan data realisasi Belanja Operasi dan realisasi PAD pada kabupaten/kota Sumatera Utara tahun 2021-2023:

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2021 (miliar rupiah)		Tahun 2022 (miliar rupiah)		Tahun 2023 (miliar rupiah)	
		Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD
1	Kab. Asahan	1.126.624.246.188	134.864.406.995	1.131.016.806.164	157.521.134.076	1.200.173.958.437	169.326.017.625
2	Kab. Dairi	757.204.880.990	72.268.890.301	757.712.293.114	84.618.675.421	844.293.304.488	85.084.763.844
3	Kab. Deli Serdang	2.424.674.840.910	926.137.759.153	2.641.351.472.407	1.041.668.145.481	2.761.423.726.370	1.048.080.443.589
4	Kab. Karo	896.003.961.283	108.359.804.241	925.618.228.805	97.474.399.999	934.206.103.692	103.440.404.583
5	Kab. Labuhanbatu	960.442.859.433	238.194.215.394	967.785.136.299	184.403.843.932	1.021.869.546.656	204.630.088.161
6	Kab. Langkat	1.539.110.261.048	158.480.919.772	1.579.488.241.699	140.628.891.267	1.659.647.305.369	255.321.768.506
7	Kab. Mandailing Natal	1.020.902.139.554	142.409.606.087	1.027.255.894.675	93.998.645.256	1.133.825.712.541	124.677.017.400
8	Kab. Nias	514.909.343.403	103.944.559.551	529.525.658.952	96.013.311.708	564.267.230.303	121.549.175.855
9	Kab. Simalungun	1.406.668.512.878	177.646.004.174	1.442.122.042.598	158.095.359.457	1.516.114.211.151	170.619.769.576
10	Kab. Tapanuli Selatan	792.868.270.476	134.093.420.731	894.848.100.986	129.502.685.760	1.058.572.729.835	162.812.997.010
11	Kab. Tapanuli Tengah	768.058.776.859	84.473.837.625	755.559.464.595	75.256.684.012	817.906.120.669	79.065.207.857
12	Kab. Tapanuli Utara	918.034.972.260	162.791.620.432	862.090.696.072	145.689.119.621	927.720.435.846	134.848.617.519
13	Kab. Toba	639.786.910.162	75.305.600.200	641.908.469.494	73.220.848.674	723.948.363.074	90.456.753.553
14	Kota Binjai	738.823.635.638	91.986.343.406	781.911.275.779	107.762.359.865	790.902.077.346	113.119.618.444
15	Kota Medan	3.833.501.098.375	1.906.512.189.047	4.411.464.936.830	2.230.554.495.747	4.788.957.849.977	2.442.782.732.669
16	Kota Pematang Siantar	717.400.766.739	137.849.088.370	738.303.068.493	154.210.931.232	788.884.206.660	141.077.643.335
17	Kota Sibolga	481.221.646.923	76.263.787.133	555.581.327.682	82.398.151.034	609.192.245.705	87.004.057.222
18	Kota Tanjung Balai	523.210.868.088	58.650.167.941	547.656.146.195	54.088.438.648	586.583.190.959	74.374.497.357
19	Kota Tebing Tinggi	498.357.709.828	82.930.324.048	547.949.669.191	88.746.827.290	560.131.637.878	97.310.116.162
20	Kota Padang Sidempuan	606.518.529.014	59.865.657.758	645.045.218.934	63.144.333.001	689.135.535.674	68.453.806.606
21	Kab. Pakpak Bharat	364.406.390.933	24.443.194.479	360.727.614.855	18.005.084.566	393.743.129.826	20.624.024.881
22	Kab. Nias Selatan	687.216.771.606	32.822.654.372	654.207.605.051	29.355.548.731	728.592.793.890	25.439.122.674
23	Kab. Humbang Hasundutan	618.162.640.162	26.917.795.029	647.724.734.126	65.324.668.195	666.196.662.043	68.332.187.469
24	Kab. Serdang Bedagai	941.965.858.385	133.466.455.515	1.053.165.227.998	117.658.930.319	1.018.555.673.755	151.087.092.665
25	Kab. Samosir	516.363.895.207	61.871.566.524	510.047.658.193	63.698.152.720	575.587.453.364	69.628.488.029
26	Kab. Batu Bara	788.535.676.107	174.549.720.181	796.745.938.086	109.336.570.850	834.588.248.911	134.794.666.811
27	Kab. Padang Lawas	633.718.870.021	46.759.858.387	580.203.496.511	46.926.773.423	629.432.980.886	44.195.197.316
28	Kab. Padang Lawas Utara	608.059.186.341	43.312.600.311	658.900.225.153	43.152.592.302	685.665.882.991	46.884.394.366
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	587.612.223.925	63.254.710.984	586.193.713.980	53.150.702.676	647.504.326.057	61.081.576.642
30	Kab. Labuhanbatu Utara	687.356.462.423	58.863.185.741	692.803.025.068	50.652.416.193	771.467.950.069	57.224.029.259
31	Kab. Nias Utara	426.157.668.324	20.175.811.945	456.289.860.273	12.084.292.975	506.011.981.682	16.951.900.600
32	Kab. Nias Barat	394.017.700.357	18.267.918.507	431.614.721.260	12.655.553.070	471.984.595.509	15.588.182.641
33	Kota Gunungsitoli	413.474.510.675	21.417.950.730	425.431.833.527	25.231.747.566	500.943.824.969	27.398.988.049
Total		28.831.372.084.516	5.659.151.625.067	30.238.249.803.042	5.906.230.315.068	32.408.030.996.582	6.513.265.348.275

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 terjadi kenaikan nilai pendapatan asli daerah di 11 kabupaten/kota wilayah sumatera utara tahun 2021-2023, sementara terdapat 19

kabupaten/kota nilai pendapatan asli daerah tidak stabil yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kenaikan pada tahun 2023, dan terdapat 3 kabupaten/kota lainnya yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah dari tahun 2021-2023.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah; (2) Masih rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer (*Intergovernmental Revenue*); (3) Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada (Kusufi and M. 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dasmar dan Basri (2020) menemukan bahwa semakin besar nilai *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019) yang menemukan bahwa jika kekayaan suatu daerah mengalami kenaikan secara signifikan maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah sebab besar atau kecilnya penerimaan dana perimbangan sangat mempengaruhi kinerja keuangan.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang tinggi menjadikan daerah tersebut tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit

tercapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan. Menurut Mardiasmo (2004:155), yang harus di pahami adalah bahwa kewenangan yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan PAD saja, tetapi juga kewenangan dalam penggunaan dana perimbangan.

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mustikarini and Fitriyani 2012). Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah. PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif sesuai kebutuhan pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, et al. 2012). Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka Pemda akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pertimbangan dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk membawa penelitian dengan judul “Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti mengemukakan bahwa ketika nilai belanja operasi lebih besar dari pendapatan asli daerah maka akan menyebabkan defisit yang akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah dalam menggali potensi kekayaan daerahnya. Ketika *intergovernmental revenue* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan baik (Iswantini, Hirmantono and Natalia 2021). Berdasarkan tabel realisasi belanja operasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021-2023, terdapat kesenjangan yang signifikan antara realisasi PAD dan realisasi belanja operasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah.

Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut karena masih minimnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pengalokasian dana perimbangan yang pada awalnya untuk menjembatani celah fiskal belum mampu digunakan dengan baik sehingga tujuan utama tersebut belum tercapai. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diukur dengan metode data panel dengan variabel dependen (Y) menggunakan pengukuran rasio efisiensi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, peneliti mengemukakan beberapa pertanyaan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023?
3. Apakah *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini bila dikaitkan dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan tentang pengaruh *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur melalui rasio efisiensi dan juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para masyarakat luas dalam melihat kinerja pemerintah suatu daerah sehingga dapat ikut andil membantu pemerintah daerahnya untuk mengulik potensi yang dimiliki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal (*signalling theory*) membahas terkait isyarat yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yaitu pemerintahan terhadap pihak luar (masyarakat) guna menyampaikan keberhasilan atau kegagalan suatu *output* yang telah dilakukan (Gumanti 2009). Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian *signal* dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengurangi informasi asimetris. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang pemerintah dapat menyebabkan masyarakat melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk pemerintah daerah tersebut. Pemerintah dapat meningkatkan nilai daerahnya dengan memberikan *signal* kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek daerah pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja pemerintah yang baik akan meningkatkan nilai daerahnya masing-masing.

Sinyal-sinyal yang dapat digunakan dalam hal ini antara lain: (a) realisasi PAD yang tinggi, dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan; (b) rasio belanja daerah yang efisien, dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya; (c) kualitas pelaporan keuangan yang baik, dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah

2.2.1.1 Definisi Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja berasal dari *performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Sujarweni 2022,107). Menurut Rengganis, Valianti dan Oktariansyah (2020, 119-120), kinerja keuangan merupakan pencapaian dari pemerintah atas terlaksana pengelolaan keuangan selama periode tertentu guna menunjukkan kriteria kinerjanya dimana dapat diperoleh dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Kinerja keuangan merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah selama periode waktu tertentu dalam melaksanakan anggaran yang ditetapkan secara kuantitas dan kualitas (Mujiyani and Salma 2023). Berdasarkan definisi yang telah ada dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang termasuk perusahaan *non profit* memiliki sebuah kinerja keuangan yang wajib dicapai sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan atau program telah selesai guna menjadi pengukuran kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2.2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menganalisis kinerja keuangan diperlukan rangkaian proses yang secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi serta memberi solusi terhadap keuangan entitas pada periode yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan yang disebutkan bertujuan memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik, serta memperbaiki komunikasi kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja keuangan. Sehingga dalam pengukuran ini dapat menjadi alat pengendalian organisasi.

2.2.1.3 Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan

Rasio pengukuran kinerja keuangan merupakan gambaran suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam pos laporan keuangan yang satu dengan jumlah lain pada pos laporan keuangan yang lain (Lisaria 2021). Pengukuran kinerja keuangan dengan metode analisis rasio dapat mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan suatu lembaga pemerintahan dalam kinerja keuangannya. Dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah karena sifatnya yang belum komersial.

Analisis rasio yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dicapai dari suatu periode dengan

periode sebelumnya. Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan tolak ukur kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan (Siswanto and Maylani 2022). Pengukuran dengan jenis rasio ini dengan membandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut merupakan rumus rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Siswanto dan Maylani (2022)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian sebuah gambaran dalam mengukur seberapa besar penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Oki, W.Nalle and A.V.Meomanu 2020). Ukuran tingkat kemandirian lembaga pemerintahan daerah dengan membandingkan besarnya pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah diasumsikan kemandirian berada ditingkat sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Oki, W. Nalle & Meomanu (2020)

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari penggunaan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah guna memperlihatkan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal mengarahkan pemasukan PAD sesuai target awal (Supriyadi and Fandi 2021). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Supriyadi & Fandi (2021)

Secara umum, kategori efektivitas PAD dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% – 99%
Kurang Efektif	75% – 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Kurniasari (2014)

4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menghitung perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Jika semakin kecil rasio yang dihasilkan maka hasilnya akan semakin efisien, dan semakin besar rasio yang dihasilkan akan semakin tidak efisien. Pengukuran dengan rasio ini diharapkan dapat mengukur nilai efisiensi kinerja pemerintah daerah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rasio dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi 2016):

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Secara umum, kategori efisiensi PAD dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% – 20%
Cukup Efisien	21% – 30%
Kurang Efisien	31% – 40%
Tidak Efisien	> 40%

Sumber: Kurniasari (2014)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio efisiensi sebagai alat ukur dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah Sumatera Utara.

2.2.2 *Intergovernmental Revenue*

Pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan efisien dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan sebagai penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Intergovernmental revenue* atau yang biasa disebut sebagai dana perimbangan (Suhardjanto, *et al.* 2010). Pendapatan yang diterima pemerintah daerah berasal dari sumber eksternal dan tidak diperlukan pembayaran kembali merupakan definisi dari *intergovernmental revenue* (Patrick 2007, 41-42). Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil

bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Pasal 51 dirumuskan berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan
- b. Karakteristik daerah.

Sedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada menteri keuangan. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur *intergovernmental revenue* pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara yakni:

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber: Suhardjanto dkk (2010)

2.2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan merupakan suatu kondisi yang memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Jika semakin besar kekayaan suatu daerah, maka pemerintah daerah tersebut dituntut untuk bertanggung jawab lebih besar dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki (Rokhayah 2020). Salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta mempertahankan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat (Jessica dan Suhartono 2020, 19).

Adapun sumber dari Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah, pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi daerah. Adapun pendapatan pajak setiap provinsinya berbeda-beda sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Di Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Di Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berikut ini merupakan jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota tersusun dari objek pendapatan, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian

Golongan C, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, dan BPHTB.

- b. Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan retribusi menurut Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatan jenis ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pendapatan jenis ini diperinci sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksana pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
12. Pendapatan dari pengembalian
13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
15. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
16. Hasil pengelolaan dana bergulir

Berdasarkan rincian sumber dari pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber Kekayaan Daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan}$$

Sumber: Rokhayah (2020)

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa hasil dari tinjauan peneliti terdahulu yang akan dibandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mendukung penyusunan dan mencari hasil penelitian.

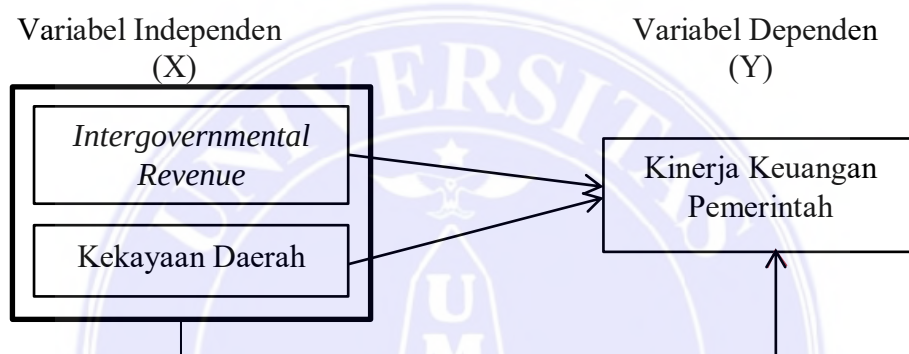
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh).	Variabel Kekayaan Daerah (X_1), dan Dana Perimbangan (X_2) dan Rasio Variabel Kinerja Keuangan (Y)	Kekayaan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2	Iswantini, Hirmantono dan Natalia (2021)	Pajak Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Lamongan).	Variabel <i>Intergovernmental Revenue</i> (X_1) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	<i>Intergovernmental Revenue</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3	Satria dan Sari (2018)	Pengaruh Wealth, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Leverage, dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe).	Variabel <i>Intergovernmental Revenue</i> (X_2) dan Rasio Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	<i>Intergovernmental Revenue</i> secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.
4	Dasmar, Basri dan Indrawati, (2020)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Variabel Kekayaan Daerah (X_1), dan <i>Intergovernmental Revenue</i> (X_3) dan Rasio Variabel Kinerja Keuangan (Y).	Kekayaan Daerah dan <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan pada kabupaten/kota di Riau.

Sumber: Diolah peneliti 2024

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu *intergovernmental revenue* (X_1) dan kekayaan daerah (X_2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat menghasilkan suatu kerangka teoritis yang digambarkan dalam bentuk diagram sistematis, yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual dan rumusan masalah, maka menghasilkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

2.5.1 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Intergovernmental revenue merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah bersumber dari eksternal dan tidak diperlukan pembayaran kembali (Satria and Sari 2018). Alokasi pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh *intergovernmental revenue* sehingga disimpulkan sebagai tingkat

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pada penelitian Dasmara dan Indrawati (2020) ditemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian tersebut didukung oleh (Satria dan Sari 2018) menghasilkan bahwa terdapat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena nilai *intergovernmental revenue* terus meningkat setiap tahunnya.

Penerimaan bantuan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara efektif serta efisien untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang dimiliki secara maksimal. Semakin besar proporsi penerimaan *intergovernmental revenue* dalam pemerintah daerah, juga semakin baik kinerja keuangannya. Berdasarkan rangkaian di atas dapat dihasilkan hipotesis pada penelitian ini, yakni:

H1 : *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5.2 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah merupakan cerminan dalam kemampuan daerah dalam meningkatkan potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut dapat digunakan dalam memaksimalkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat dan guna memajukan sumber daya daerah tersebut. Ketika suatu daerah memiliki tingkat kekayaan lebih rendah dari daerah yang lain maka akan semakin buruk pula kinerja keuangan pemerintah tersebut (Sadek dan Kusumawati 2024). Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 TAHUN 2004, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan dana dari pusat berasal dari pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah. Pada penelitian Armaja dan Aliamin (2015) menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun pada penelitian (Sadek dan Kusumawati 2024) bahwa kontribusi Kekayaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2015), pengaruh negatif PAD terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah daerah, maka akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan kekayaan yang besar, sehingga berdampak buruk atau penurunan penilaian pada kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat menghasilkan hipotesis pada penelitian ini, yakni:

H2 : Kekayaan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5.3 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam mengukur suatu kinerja keuangan pada pemerintahan diperlukannya pengukuran besaran yang diterima dana transfer dari pusat ke daerah atau yang disebut dengan *intergovernmental revenue*. Dana perimbangan yang diberikan

melalui pemerintah pusat juga berdasarkan dari kriteria atau potensi yang dimiliki setiap daerah karena kekayaan yang dimiliki berbeda-beda. Dalam hal ini, antara *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah dapat menjadi pengaruh yang saling simultan kepada kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat menghasilkan hipotesis pada penelitian ini, yakni:

H3 : *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara melalui website resmi dan dari Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021-2023 yang dipublish oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan Pemerintah Sumatera Utara periode 2021-2023. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024 dengan perincian waktu seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Perencanaan Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2024				Tahun 2025	
		Februari	April-Juni	September	Okt-Des	Februari	Maret
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi Proposal						
6	Pembahasan Hasil						
7	Seminar Hasil						
8	Revisi Seminar Hasil						
9	Sidang Meja Hijau						

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023 yang diukur dengan proksi rasio efisiensi. Kinerja keuangan merupakan ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Achmad, Septiyanti dan Metalia 2017). Terdapat banyak indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Rasio efisiensi guna mengukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menunjukkan kemampuan daerah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3.3.2 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu, *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah. Pemilihan variabel independen *intergovernmental revenue* atau disebut dengan dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan asas desentralisasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio dari total dana perimbangan terhadap total pendapatan.

Pemilihan variabel independen kekayaan pemerintah daerah yaitu dikarenakan tingkat kekayaan daerah yang tinggi dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki. Ketika suatu daerah memiliki kekayaan

daerah yang tinggi maka daerah tersebut diharapkan dapat melaksanakan roda pemerintahannya tanpa tambahan dana dari pemerintah pusat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio dari pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Gambaran suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam pos laporan keuangan yang satu dengan jumlah lain pada pos laporan keuangan yang lain (Lisaria 2021).	Menurut (Mahmudi 2016), rumus dari rasio efisiensi yaitu : $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
2	<i>Intergovernmental Revenue</i> (X_1)	Pendapatan yang diterima pemerintah daerah berasal dari sumber eksternal dan tidak diperlukan pembayaran kembali (Patrick 2007).	Menurut (Suhardjanto, et al. 2010) $\text{IR} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio
3	Kekayaan Pemerintah Daerah (X_2)	Kekayaan merupakan suatu kondisi yang memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan (Rokhayah 2020).	Menurut (Rokhayah 2020) $\text{Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio

Sumber: Diolah peneliti 2024

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023 melalui data laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara yang dipublikasikan. Data laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih/kurang, neraca, laporan operasional,

laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Dibawah ini merupakan daftar kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara:

Tabel 3.3 Daftar kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara
1	Kabupaten Asahan
2	Kabupaten Batubara
3	Kabupaten Dairi
4	Kabupaten Deli Serdang
5	Kabupaten Humbang Hasundutan
6	Kabupaten Karo
7	Kabupaten Labuhan Batu
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara
10	Kabupaten Langkat
11	Kabupaten Mandailing Natal
12	Kabupaten Nias
13	Kabupaten Nias Barat
14	Kabupaten Nias Selatan
15	Kabupaten Nias Utara
16	Kabupaten Padang Lawas
17	Kabupaten Padang Lawas Utara
18	Kabupaten Pakpak Barat
19	Kabupaten Samosir
20	Kabupaten Serdang Bedagai
21	Kabupaten Simalungun
22	Kabupaten Tapanuli Selatan
23	Kabupaten Tapanuli Tengah
24	Kabupaten Tapanuli Utara
25	Kabupaten Toba
26	Kota Binjai
27	Kota Gunung Sitoli
28	Kota Medan
29	Kota Padangsidiropuan
30	Kota Pematang Siantar
31	Kota Sibolga
32	Kota Tanjung Balai
33	Kota Tebing Tinggi

Sumber: www.kemendagri.go.id

Pemilihan sampel yang digunakan dengan menggunakan teknik sampel jenuh dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang telah mempublikasikan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerahnya dalam kurun waktu 2021-2023.

Tabel 3. 4 Seleksi dan Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara	33
Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang mempublikasikan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerahnya dalam kurun waktu 2021-2023	33
Jumlah wilayah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria	33

Sumber: Diolah peneliti 2024

Berdasarkan populasi penelitian diatas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota yang memiliki kriteria pada tabel 3.4 yaitu sebanyak 33 daerah periode 2021-2023, maka terdapat 99 sampel yang diambil dalam laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan serta dokumen yang sudah ada (Satria dan Sari 2018). Digunakan data sekunder berdasarkan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga andal untuk digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan data-data dari Laporan Keuangan Daerah Sumatera Utara, buku alokasi dan rangkuman kebijakan transfer ke daerah wilayah Sumatera Utara melalui website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah mengolah artikel, jurnal, litelatur, dan juga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Eviews dalam mengolah data yang menggunakan Statistik Deskriptif, Pemilihan Model Regresi dengan menggunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, Uji Asumsi Klasik dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, Regresi Data Panel, dan Pengujian Hipotesis dengan Uji Signifikansi (Uji Parsial), Uji F (Uji Simultan), dan Uji Determinasi (R^2).

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2019). Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data dari variabel independen yaitu *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah serta variabel dependen berupa kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara. Data dari statistik deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif (*descriptive statistic*) yang mencakup parameter statistik dalam menguraikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standart deviasi.

3.6.2 Pemilihan Model Regresi

3.6.2.1 Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang sebaiknya digunakan, apakah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini dilakukan menggunakan program *Eviews*. Adapun ketentuan untuk pengujian F-Stat/Uji *Chow* yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai *probability* dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Apabila nilai *probability* dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.6.2.2 Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* dengan tujuan untuk menentukan model mana yang sebaiknya dapat digunakan. Pengujian dilakukan menggunakan program *Eviews*. Berikut ini merupakan ketentuan untuk pengujian *Hausman*:

1. Apabila nilai *probability* dari *Cross-section random* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dengan model regresi yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Apabila nilai *probability* dari *Cross-section random* $\leq 0,05$ maka H_0 diterima dengan model regresi yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Nilai residual mengikuti distribusi normal, sehingga jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Priyatno 2022). Uji normalitas dengan analisis uji statistik yang digunakan adalah nilai probabilitasnya dengan hipotesis sebagai berikut:

$> 0,05$ = Residual berdistribusi Normal

$< 0,05$ = Residual tidak berdistribusi Normal

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen) (Priyatno 2022). Efek dari multikoloniaritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dengan metode *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya mulitikolinearitas adalah nilai $VIF < 10$. Apabila nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinearitas (Priyatno 2022).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Priyatno 2022). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Priyatno 2022):

1. Jika nilai *Probability Chi-square* lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga disimpulkan ada masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai *Probability Chi-square* lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan keadaan terjadinya korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengkaji apakah suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $(t-1)$. Jika terjadi korelasi maka disebut dengan masalah autokorelasi. Model regresi terbaik adalah regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi (Priyatno 2022).

Perhitungan uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* (Priyatno 2022).

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada masalah autokorelasi

H_1 : Ada masalah autokorelasi

Probabilitas $< \alpha$ (0.05), H_0 ditolak, H_1 diterima

Probabilitas $> \alpha$ (0.05), H_1 ditolak, H_0 diterima

3.6.4 Regresi Data Panel

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, dan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Menurut Basuki dan Prawoto (2017:25), data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data *time series* merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross section* merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

Penggunaan data panel dalam penelitian ini karena terdapat rentang waktu beberapa tahun dan banyaknya objek kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara. Penggunaan data *time series* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rentang waktu tiga tahun dari tahun 2021-2023. Kemudian penggunaan *cross section* karena pengambilan data diambil dari 29 kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara yang memiliki Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

Penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan yang dijabarkan sebagai berikut (Basuki and Prawoto 2017):

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Data panel dapat digunakan untuk menguji, membangun, dan mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
3. Data panel mendasarkan pada observasi yang bersifat *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih bervariasi, dan dapat mengurangi kolinieritas antarvariabel, derajat kebebasan (*degree of freedom/ df*) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin akan timbul oleh agregasi data individu.
6. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak secara terpisah di observasi dengan menggunakan data *time series* maupun *cross section*.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji signifikansi parameter individual (uji parsial t), uji koefisien regresi, dan uji determinasi.

3.6.5.1 Uji Signifikansi (Uji Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan

dalam uji t adalah sebagai berikut, jika nilai profitabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak sehingga variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai profitabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima sehingga variabel berpengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno 2022).

3.6.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Penelitian dengan menggunakan Uji F atau uji simultan guna mengetahui apakah semua variabel bebas jika dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen.. Adapun menurut (Priyatno 2022) cara penggunaannya dengan melihat jika besar nilai probabilitas signifikannya $< 5\%$ maka variabel indeenden atau variabel bebas akan berpengaruh secara bersama terhadap variabel terikat. Pengambilan kesimpulan pada uji F, yaitu :

1. Jika nilai F hitung $< F$ tabel dan jika probabilitas (signifikasi) $> 0,05(\alpha)$, maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika nilai F hitung $> F$ tabel dan jika probabilitas (signifikasi) lebih kecil dari $0,05(\alpha)$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen.

3.6.5.3 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 merupakan pengukuran kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Priyatno 2022). Koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Sedangkan untuk nilai R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi independen. R^2 menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Variabel *intergovernmental revenue* (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Variabel kekayaan pemerintah daerah (X_2) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan antara variabel kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.
3. Variabel *intergovernmental revenue* (X_1) dan kekayaan pemerintah daerah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk mendukung kinerja keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
3. Perlu dilakukannya evaluasi dan pemantauan kinerja keuangan daerah secara berkala.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abu, Ratna Septiyanti, and Mega Metalia. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2017: 1-14.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, and Aliamin. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2015: 171-172.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, and Aliamin. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2015: 168-181.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- BPK RI. *JDIH BPK RI*. October 02, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (accessed April 2, 2024).
- Dasmar, Taufik, and Y M, Indrawati, Novita Basri. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Al Iqtishad*, 2020: 51-52.
- Dasmar, Taufik, Yesi Mutia Basri, and Novita Indrawati. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Al Iqtishad*, 2020: 39-56.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Iswantini, Dwi Agustina, Agung Hirmantono, and Rita Natalia. "Pajak Daerah, Intergovernmental Revenue dan Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Lamongan)." *Jurnal ITB Ahmad Dahlan Lamongan*, 2021: 41-42.

- Jessica, Novertasya, and Sugi Suhartono. "Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2018)." *Akuntansi Keuangan*, 2020: 19.
- Lisaria, Putri Rumanintya. "Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar." *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2021: 3.
- M.Nafarin. "Penganggaran Perusahaan." 11. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Meylinda, D Darwis, and Suaidah. "Pengukuran Kinerja Laporan Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Profitabilitas Pada Perusahaan Go Public." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 2022: 20.
- Mujiyani, and A P Salma. "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED PADA PT.INDOSAT, TBK DAN PT.AXIATA TBK (PERIODE TAHUN 2016-2021)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023: 105.
- Nugroho, Tatas Ridho, and Novi Eko Prasetyo. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur." *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2018: 31.
- Oki, Kamilaus Kostanse, Frederic W.Nalle, and Pricilia A.V.Meomanu. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5 (Juni 2020).
- Patrick, Patricia A. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D dissertation, United States: The Pennsylvania State University, 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. "BPK RI." *Peraturan BPK*. May 15, 2006. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Permen-No.13-2006.pdf (accessed April 25, 2024).
- Priyatno, Dwi. *Analisis Regresi Linier dengan Program SPSS dan Analisis Data Panel dengan Program Evies*. Yogyakarta: Harapan Cahaya, 2022.

- Putri, Ni Kadek Novia Indrawati, and Ni Putu Ayu Darmayanti. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen*, 2019: 2854-2855.
- Putri, Rumanintya Lisaria. "Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar." *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2021: 3.
- Rengganis, O, R, M Valianti, and Oktariansyah. "Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung." *Jurnal Mediasi*, 2020: 119-120.
- Rokhayah, Siti. *Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara @2021 Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - Gedung Syafruddin Prawiranegara / Lt.12 Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta. July 14, 2020.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13250/Menilai-Barang-Milik-Daerah-Sekaya-Apa-Daerahmu.html> (accessed April 2, 2024).
- Sadek, Sefhvira Chilly Bella Tiara, and Eny Kusumawati. "Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Journal of Social Science Research*, 2024: 9081-9100.
- Satria, Dy Ilham, and Heny Puspita Sari. "Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*, 2018: 9-21.
- Suhardjanto, Djoko, Mandasari Rusmin, Putriesti, and Alistair Brown. "Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities." *Journal Public Policy*, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 TAHUN. "JDIH BPK RI." *Peraturan BPK*. October 15, 2004. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202004.pdf> (accessed April 15, 2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2021 (miliar rupiah)		Tahun 2022 (miliar rupiah)		Tahun 2023 (miliar rupiah)	
		Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD
1	Kab. Asahan	1.126.624.246.188	134.864.406.995	1.131.016.806.164	157.521.134.076	1.200.173.958.437	169.326.017.625
2	Kab. Dairi	757.204.880.990	72.268.890.301	757.712.293.114	84.618.675.421	844.293.304.488	85.084.763.844
3	Kab. Deli Serdang	2.424.674.840.910	926.137.759.153	2.641.351.472.407	1.041.668.145.481	2.761.423.726.370	1.048.080.443.589
4	Kab. Karo	896.003.961.283	108.359.804.241	925.618.228.805	97.474.399.999	934.206.103.692	103.440.404.583
5	Kab. Labuhanbatu	960.442.859.433	238.194.215.394	967.785.136.299	184.403.843.932	1.021.869.546.656	204.630.088.161
6	Kab. Langkat	1.539.110.261.048	158.480.919.772	1.579.488.241.699	140.628.891.267	1.659.647.305.369	255.321.768.506
7	Kab. Mandailing Natal	1.020.902.139.554	142.409.606.087	1.027.255.894.675	93.998.645.256	1.133.825.712.541	124.677.017.400
8	Kab. Nias	514.909.343.403	103.944.559.551	529.525.658.952	96.013.311.708	564.267.230.303	121.549.175.855
9	Kab. Simalungun	1.406.668.512.878	177.646.004.174	1.442.122.042.598	158.095.359.457	1.516.114.211.151	170.619.769.576
10	Kab. Tapanuli Selatan	792.868.270.476	134.093.420.731	894.848.100.986	129.502.685.760	1.058.572.729.835	162.812.997.010
11	Kab. Tapanuli Tengah	768.058.776.859	84.473.837.625	755.559.464.595	75.256.684.012	817.906.120.669	79.065.207.857
12	Kab. Tapanuli Utara	918.034.972.260	162.791.620.432	862.090.696.072	145.689.119.621	927.720.435.846	134.848.617.519
13	Kab. Toba	639.786.910.162	75.305.600.200	641.908.469.494	73.220.848.674	723.948.363.074	90.456.753.553
14	Kota Binjai	738.823.635.638	91.986.343.406	781.911.275.779	107.762.359.865	790.902.077.346	113.119.618.444
15	Kota Medan	3.833.501.098.375	1.906.512.189.047	4.411.464.936.830	2.230.554.495.747	4.788.957.849.977	2.442.782.732.669
16	Kota Pematang Siantar	717.400.766.739	137.849.088.370	738.303.068.493	154.210.931.232	788.884.206.660	141.077.643.335
17	Kota Sibolga	481.221.646.923	76.263.787.133	555.581.327.682	82.398.151.034	609.192.245.705	87.004.057.222
18	Kota Tanjung Balai	523.210.868.088	58.650.167.941	547.656.146.195	54.088.438.648	586.583.190.959	74.374.497.357
19	Kota Tebing Tinggi	498.357.709.828	82.930.324.048	547.949.669.191	88.746.827.290	560.131.637.878	97.310.116.162
20	Kota Padang Sidempuan	606.518.529.014	59.865.657.758	645.045.218.934	63.144.333.001	689.135.535.674	68.453.806.606
21	Kab. Pakpak Bharat	364.406.390.933	24.443.194.479	360.727.614.855	18.005.084.566	393.743.129.826	20.624.024.881
22	Kab. Nias Selatan	687.216.771.606	32.822.654.372	654.207.605.051	29.355.548.731	728.592.793.890	25.439.122.674
23	Kab. Humbang Hasundutan	618.162.640.162	26.917.795.029	647.724.734.126	65.324.668.195	666.196.662.043	68.332.187.469
24	Kab. Serdang Bedagai	941.965.858.385	133.466.455.515	1.053.165.227.998	117.658.930.319	1.018.555.673.755	151.087.092.665
25	Kab. Samosir	516.363.895.207	61.871.566.524	510.047.658.193	63.698.152.720	575.587.453.364	69.628.488.029
26	Kab. Batu Bara	788.535.676.107	174.549.720.181	796.745.938.086	109.336.570.850	834.588.248.911	134.794.666.811
27	Kab. Padang Lawas	633.718.870.021	46.759.858.387	580.203.496.511	46.926.773.423	629.432.980.886	44.195.197.316
28	Kab. Padang Lawas Utara	608.059.186.341	43.312.600.311	658.900.225.153	43.152.592.302	685.665.882.991	46.884.394.366
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	587.612.223.925	63.254.710.984	586.193.713.980	53.150.702.676	647.504.326.057	61.081.576.642
30	Kab. Labuhanbatu Utara	687.356.462.423	58.863.185.741	692.803.025.068	50.652.416.193	771.467.950.069	57.224.029.259
31	Kab. Nias Utara	426.157.668.324	20.175.811.945	456.289.860.273	12.084.292.975	506.011.981.682	16.951.900.600
32	Kab. Nias Barat	394.017.700.357	18.267.918.507	431.614.721.260	12.655.553.070	471.984.595.509	15.588.182.641
33	Kota Gunungsitoli	413.474.510.675	21.417.950.730	425.431.833.527	25.231.747.566	500.943.824.969	27.398.988.049
Total		28.831.372.084.516	5.659.151.625.067	30.238.249.803.042	5.906.230.315.068	32.408.030.996.582	6.513.265.348.275

Tabulasi Data Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kinerja Keuangan (Y)			Intergovernmental Revenue (X1)			Kekayaan Pemerintah Daerah (X2)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kab. Asahan	8,35	7,18	7,09	0,79	0,82	0,82	0,08	0,09	0,09
2	Kab. Dairi	10,48	8,95	9,92	0,85	0,88	0,88	0,06	0,07	0,07
3	Kab. Deli Serdang	2,62	2,54	2,63	0,63	0,65	0,66	0,26	0,28	0,27
4	Kab. Karo	8,27	9,50	9,03	0,83	0,80	0,85	0,08	0,07	0,07
5	Kab. Labuhanbatu	4,03	5,25	4,99	0,71	0,76	0,77	0,18	0,15	0,14
6	Kab. Langkat	9,71	11,23	6,50	0,83	0,87	0,82	0,07	0,06	0,11
7	Kab. Mandailing Natal	7,17	10,93	9,09	0,83	0,88	0,87	0,08	0,06	0,07
8	Kab. Nias	4,95	5,52	4,64	0,82	0,86	0,84	0,12	0,10	0,12
9	Kab. Simalungun	7,92	9,12	8,89	0,82	0,88	0,85	0,08	0,07	0,07
10	Kab. Tapanuli Selatan	5,91	6,91	6,50	0,83	0,83	0,82	0,09	0,08	0,10
11	Kab. Tapanuli Tengah	9,09	10,04	10,34	0,84	0,87	0,88	0,07	0,06	0,07
12	Kab. Tapanuli Utara	5,64	5,92	6,88	0,80	0,83	0,85	0,11	0,11	0,10
13	Kab. Toba	8,50	8,77	8,00	0,85	0,87	0,86	0,07	0,07	0,08
14	Kota Binjai	8,03	7,26	6,99	0,80	0,80	0,79	0,11	0,12	0,12
15	Kota Medan	2,01	1,98	1,96	0,41	0,38	0,43	0,38	0,41	0,42
16	Kota Pematang Siantar	5,20	4,79	5,59	0,77	0,76	0,77	0,15	0,16	0,15
17	Kota Sibolga	6,31	6,74	7,00	0,81	0,82	0,79	0,13	0,13	0,14
18	Kota Tanjung Balai	8,92	10,13	7,89	0,83	0,82	0,81	0,10	0,09	0,11
19	Kota Tebing Tinggi	6,01	6,17	5,76	0,78	0,74	0,76	0,12	0,13	0,14
20	Kota Padang Sidempuan	10,13	10,22	10,07	0,85	0,83	0,83	0,08	0,08	0,08
21	Kab. Pakpak Bharat	14,91	20,03	19,09	0,90	0,91	0,92	0,05	0,03	0,04
22	Kab. Nias Selatan	20,94	22,29	28,64	0,90	0,94	0,94	0,02	0,02	0,02
23	Kab. Humbang Hasundutan	22,96	9,92	9,75	0,93	0,86	0,86	0,03	0,07	0,07
24	Kab. Serdang Bedagai	7,06	8,95	6,74	0,82	0,85	0,85	0,09	0,08	0,09
25	Kab. Samosir	8,35	8,01	8,27	0,87	0,87	0,87	0,07	0,08	0,08
26	Kab. Batu Bara	4,52	7,29	6,19	0,76	0,82	0,81	0,15	0,10	0,11
27	Kab. Padang Lawas	13,55	12,36	14,24	0,88	0,91	0,90	0,04	0,05	0,04
28	Kab. Padang Lawas Utara	14,04	15,27	14,62	0,88	0,91	0,91	0,04	0,04	0,04
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	9,29	11,03	10,60	0,84	0,86	0,85	0,07	0,06	0,06
30	Kab. Labuhanbatu Utara	11,68	13,68	13,48	0,85	0,88	0,88	0,06	0,05	0,05
31	Kab. Nias Utara	21,12	37,76	29,85	0,90	0,92	0,92	0,03	0,02	0,02
32	Kab. Nias Barat	21,57	34,10	30,28	0,91	0,95	0,94	0,03	0,02	0,02
33	Kota Gunungsitoli	19,31	16,86	18,28	0,89	0,90	0,91	0,03	0,04	0,04

Lampiran 2 Output Hasil Uji Eviews

ANALISIS DESKRIPTIF

Date: 02/27/25			
Time: 10:17			
Sample: 2021 2023			
	Intergovernmental Revenue	Kekayaan Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan
Mean	6740.357	8237.936	9.910827
Median	6602.000	8445.000	7.960036
Maximum	9919.000	9473.000	42.09000
Minimum	4441.000	3839.000	1.620000
Std. Dev.	1088.949	1005.399	7.769099
Skewness	0.519369	-2.946933	2.736294
Kurtosis	3.049629	11.294744	9.828580
Jarque-Bera	3.947269	330.04845	236.8253
Probability	0.147374	0.000000	0.000000
Sum	593984.0	716643.0	862.3214
Sum Sq. Dev.	1.01E+09	86979884	5190.824
Observations	99	99	99

UJI CHOW

Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/27/25 Time: 10:23				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 99				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.93685	5.537353	5.925734	0.0000
INTERGOVERNMENTAL_REVENUE	0.000945	0.000840	0.839527	0.5029
KEKAYAAN_PEMERINTAH_DAERAH	-0.002974	0.000924	-4.856436	0.0000
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.984735	Mean dependent var	9.463787	
Adjusted R-squared	0.983565	S.D. dependent var	7.769884	
S.E. of regression	0.987485	Akaike info criterion	3.071245	

Sum squared resid	53.89464	Schwarz criterion	3.950387
Log likelihood	-102.2447	Hannan-Quinn criter.	3.423643
F-statistic	177.4654	Durbin-Watson stat	2.690089
Prob(F-statistic)	0.000000		

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.568574	(2.36)	0.0000
Cross-section chi-square	110.817997	2	0.0000

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		45.626782	2	0.0000
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INTERGOVERNMENTAL_REVENUE	0.000195	0.000674	0.000000	0.3538
KEKAYAAN_PEMERINTAH_DAERAH	-0.002367	-0.006709	0.000000	0.0000
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/27/25 Time: 10:27				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 99				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.93685	5.537353	5.925734	0.0000
INTERGOVERNMENTAL_REVENUE	0.000945	0.000840	0.839527	0.5029
KEKAYAAN_PEMERINTAH_DAERAH	-0.002974	0.000924	-4.856436	0.0000
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				

R-squared	0.984735	Mean dependent var	9.463787
Adjusted R-squared	0.983565	S.D. dependent var	7.769884
S.E. of regression	0.987485	Akaike info criterion	3.071245
Sum squared resid	53.89464	Schwarz criterion	3.950387
Log likelihood	-102.2447	Hannan-Quinn criter.	3.423643
F-statistic	177.4654	Durbin-Watson stat	2.690089
Prob(F-statistic)	0.000000		

UJI ASUMSI KLASIK

Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:37

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.85579	2.690489	28.936793	0.0000
INTERGOVERNMENTAL_REVE				
NUE	0.000922	0.000357	2.464678	0.0005
KEKAYAAN_PEMERINTAH_D				
AERAH	-0.007886	0.000443	-4.93679	0.0000
R-squared	0.951737	Mean dependent var	9.463787	
Adjusted R-squared	0.950365	S.D. dependent var	7.769884	
S.E. of regression	1.739580	Akaike info criterion	3.973680	
Sum squared resid	252.9478	Schwarz criterion	3.057780	
Log likelihood	-169.3453	Hannan-Quinn criter.	4.004787	
F-statistic	875.8467	Durbin-Watson stat	1.846737	
Prob(F-statistic)	0.000000			

UJI MULTIKOLINEARITAS

	Coefficient	Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
INTERGOVERNMENTAL_REVENUE	47.355673		139.8684	1.342580
KEKAYAAN_PEMERINTAH_DAER				
AH	6.474696		11.66475	1.569943
C	2.554560		1637.079	NA

UJI HETEROSKEDASTISITAS

F-statistic	5.000459	Prob. F	0.0059
Obs*R-squared	55.46579	Prob. Chi-square	0.4253
Scaled explained SS	242.0046	Prob. Chi-square	0.8857

UJI NORMALITAS

Date: 02/27/25

Time: 10:17

Sample: 2021 2023

	Intergovernmental Revenue	Kekayaan Daerah	Pemerintah Kinerja Keuangan
Mean	6740.357	8237.936	9.910827
Median	6602.000	8445.000	7.960036
Maximum	9919.000	9473.000	42.09000
Minimum	4441.000	3839.000	1.620000
Std. Dev.	1088.949	1005.399	7.769099
Skewness	0.519369	-2.946933	2.736294
Kurtosis	3.049629	11.294744	9.828580
Jarque-Bera	3.947269	330.04845	236.8253
Probability	0.147374	0.000000	0.000000
Sum	593984.0	716643.0	862.3214
Sum Sq. Dev.	1.01E+09	86979884	5190.824
Observations	99	99	99

UJI AUTOKORELASI

Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:46

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.85579	2.690489	28.936793	0.0000
INTERGOVERNMENTAL REVENUE	0.000922	0.000357	2.464678	0.0005
KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH	-0.007886	0.000443	-4.93679	0.0000
R-squared	0.984735	Mean dependent var	9.463787	
Adjusted R-squared	0.983565	S.D. dependent var	7.769884	
S.E. of regression	0.987485	Akaike info criterion	3.071245	
Sum squared resid	53.89464	Schwarz criterion	3.950387	
Log likelihood	-102.2447	Hannan-Quinn criter.	3.423643	
F-statistic	177.4654	Durbin-Watson stat	2.690089	
Prob(F-statistic)	0.000000			
F-statistic	177.4654	Prob. F	0.8477	
Obs*R-squared	46.84789	Prob. Chi-square	0.08005	

Lampiran 3 Output Hasil Penelitian

REGRESI DATA PANEL

Estimation Equation:

$$\text{KINERJA_KEUANGAN} = C(1) + C(2)*\text{INTERGOVERNMENTAL_REVENUE} + C(3)*\text{KEKAYAAN_PEMERINTAH_DAERAH}$$

Substituted Coefficients:

$$\text{KINERJA_KEUANGAN} = 69.85579 + 0.000922*\text{INTERGOVERNMENTAL_REVENUE} - 0.007886*\text{KEKAYAAN_PEMERINTAH_DAERAH}$$

UJI HIPOTESIS

Uji t

Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:46

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.85579	2.690489	28.936793	0.0000
INTERGOVERNMENTAL_REVE NUE	0.000922	0.000357	2.464678	0.0005
KEKAYAAN_PEMERINTAH_D AERAH	-0.007886	0.000443	-4.93679	0.0000
R-squared	0.951737	Mean dependent var		9.463787
Adjusted R-squared	0.950365	S.D. dependent var		7.769884
S.E. of regression	1.739580	Akaike info criterion		3.973680
Sum squared resid	252.9478	Schwarz criterion		3.057780
Log likelihood	-169.3453	Hannan-Quinn criter.		4.004787
F-statistic	875.8467	Durbin-Watson stat		1.846737
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji r square

Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:46

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.85579	2.690489	28.936793	0.0000
INTERGOVERNMENTAL_REVE				
NUE	0.000922	0.000357	2.464678	0.2245
KEKAYAAN_PEMERINTAH_D				
AERAH	-0.007886	0.000443	-34.93679	0.0000
R-squared	0.951737	Mean dependent var		9.463787
Adjusted R-squared	0.950365	S.D. dependent var		7.769884
S.E. of regression	1.739580	Akaike info criterion		3.973680
Sum squared resid	252.9478	Schwarz criterion		3.057780
Log likelihood	-169.3453	Hannan-Quinn criter.		4.004787
F-statistic	875.8467	Durbin-Watson stat		1.846737
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4 Surat Izin Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7360168, Medan 20223
 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 42402994, Medan 201222
 Website : ekonomi.uma.ac.id E-Mail: ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 4568/FEB/01.1/III/2024
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Research / Survey

26 November 2024

Kepada Yth,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

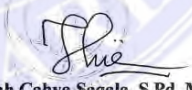
Nama : Rahmadiyah Syafitri
 NPM : 208330005
 Program Studi : Akuntansi
 No. Handphone : 089690446087
 Email : rapsyfu2412@gmail.com
 Judul : **Pengaruh Intergovernmental Revenue Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara Tahun 2021-2023**

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Kaprodi
 Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
 Program Studi Akuntansi


 Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si



Lampiran 5 Surat Balasan DJPK

LAMPIRAN
Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Nomor : S-33/PK.1/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

Tanggapan Atas Permintaan Informasi Publik a.n. Sdr. Rahmadiyah Syafitri Nomor Pendaftaran REG-8/PPID.PK/2025

Berkenaan dengan permintaan Informasi Publik yang Saudara ajukan kepada PPID Tingkat I DJPK pada tanggal 13 Januari 2025, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam permintaan informasi publik tersebut, kutipan permintaan informasi yang Saudara minta berupa:

"surat keterangan bahwa a.n Rahmadiyah Syafitri telah selesai melakukan research".

2. Atas permintaan Informasi Publik Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dapat kami sampaikan bahwa Surat Keterangan tidak dapat diberikan, karena informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPID Tingkat I DJPK. Yang dimaksud belum dikuasai yaitu PPID Tingkat I DJPK tidak menguasai informasi terkait pelaksanaan research oleh Rahmadiyah Syafitri.
3. Dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak mengeluarkan Surat Keterangan terkait pelaksanaan penelitian atas pengolahan data yang diperoleh dari permintaan Informasi Publik kepada PPID Tingkat I DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan
selaku
PPID Tingkat I DJPK,



(Tanda tangan dan cap resmi)

Ludiro

Catatan:
Segala akibat hukum dari perlakuan data/informasi ini setelah keluar dari kantor Kementerian Keuangan, menjadi tanggung jawab Pemohon/perminta data.